

BAB V

KESIMPULAN

Pemecatan Perdana Menteri Whitlam oleh Gubernur Jenderal Kerr merupakan kejadian pertama kali dalam sejarah Australia yang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Australia itu sendiri. Sebagai Negara yang menganut prinsip demokrasi, seharusnya hal itu terjadi karena sebenarnya sudah ada batas dan wewenang yang cukup jelas dalam system pemerintahan yang dianut.

Kedudukan Gubernur Jenderal dalam system pemerintahan Australia yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat Australia tetapi sudah diakui oleh masyarakat Australia sebenarnya cukup membingungkan karena kedudukan mutlaknya yang tidak melalui pemilihan umum tetapi berdasarkan penunjukan dari Ratu Inggris. Penunjukan tersebut sebenarnya dikatakan sebagai wakil Ratu Inggris di Australia dengan kedudukan kepala Negara Australia sehingga hal ini lebih tepat disebut sebagai monarki karena sebagai Negara demokrasi dan menganut prinsip egaliterian tentu saja hal penunjukan ini tidak sesuai dengan konstitusi Australia.

Dari warisan Inggris yang diterapkan dalam Negara Australia tersebut banyak membawa pengaruh dalam pelaksanaan system pemerintah yang ada di Australia karena apa yang terjadi didasarkan pada system yang dipakai oleh Negara pewarisnya, walaupun tidak semuanya bisa diambil. Salah satu dari warisan tersebut adalah tentang kedudukan dan fungsi dari Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu. Kedudukan Gubernur Jenderal yang mewakili Ratu Inggris di Australia, lebih mendapatkan tempat atau kepercayaan dari warga Australia.

Kedudukan dan fungsi Gubernur Jenderal ini ternyata malah diperkuat dengan dicantulkannya didalam konstitusi Australia yang dinamakan konstitusi persemakmuran sehingga legitimasi kedudukan Gubernur Jenderal diakui.

Disisi lain, seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum merupakan kepala pemerintahan dari system pemerintahan Australia. Namun kedudukan dan fungsi dari Perdana Menteri tidak tercantum dalam konstitusi persemakmuran Australia dan tidak satu pasal pun dari konstitusi Australia yang mengatur kedudukan dan fungsi yang jelas yang harus dilakukan Perdana Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan pemerintahan dalam system pemerintahan Australia memang pemisahan kekuasaan, namun pemisahan kekuasaan itu sangat tipis antara Gubernur Jendral dengan Perdana Menteri bahkan ada tugas dan wewenang yang hampir sama dijalankan oleh Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal misalnya dalam memilih dan memberhentikan menteri-menteri yang ada dalam pemerintahan tetapi seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dasar untuk melakukan tugas dan wewenang tersebut lebih kuat yang dipegang oleh Gubernur Jenderal dari pada Perdana Menteri.

Dalam system pemerintahan Australia, selain konstitusi yang dipakai terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan warisan Inggris yang dinamakan konvensi. Dari dua pengaturan konstitusional ini, kadang-kadang malah konvensi yang digunakan karena konvensi dianggap tidak kalah penting dengan konstitusi. Salah satu konvensi yang sudah diakui yaitu mengenai kekuasaan luar biasa Gubernur Jenderal (Reserve Power). Bahwa sebenarnya Reserve Power tidak memiliki aturan hukum yang jelas dan tergantung kebijaksanaan Gubernur Jenderal. Reserve Power merupakan aturan yang tidak akan pernah digunakan dan menurut teorinya bahwa

konstitusi juga menyatakan bahwa kekuasaan itu hanya dipergunakan bila ada konsultasi dengan PM Australia dan pimpinan partai oposisi. Penggunaan Reserve Power juga menunjukkan bahwa Australia masih mengakui kekuasaan serta keputusan Ratu Inggris secara mutlak; melalui wakilnya Gubernur Jenderal berani memecat Perdana Menteri terpilih padahal pengangkatan seorang Gubernur Jenderal berdasarkan atas rekomendasi dari seorang perdana menteri. Dari penjelasan diatas bahwa sebenarnya adalah dengan tidak adanya konstitusi atau aturan yang jelas mengakibatkan terjadinya kerancuan hak-hak dan kewajiban seorang Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal dalam pemerintahan Australia